PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK MENGURANGI PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR

LEGAL EXPLANATION ON THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY ACTIVITIES RESTRICTIONS (PPKM) TO REDUCE THE SPREAD OF COVID-19 IN INDRA MAKMU DISTRICT, EAST ACEH REGENCY

Zuleha¹⁾, Fatimah²⁾, Nur Asyiah³⁾ *

¹Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jl. Kampus Meurandeh Aceh 24354 Indonesia

Fakultas Teknik, Universitas Samudra, Aceh 24354 Indonesia

^{*)} Penulis Korespondensi: Nur Asyiah@unsam.ac.id

ABSTRAK

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sering disebut PPKM Mikro dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/Kabupaten dengan tujuan menurunkan penyebaran Covid-19 sampai tingkat kelurahan/gampong serta mengupayakan penambahan ekonomi masyarakat secara perlahan dan bertahap. PPKM Mikro diatur dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari dan diberlakukan sejak tanggal 11-25 Januari dan diperpanjang sampai bulan Maret 2021. Sebelum dilakukan PPKM Mikro telah dilaksanakan PPKM untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Sementara Provinsi Aceh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro periode 6-19 April 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan daerah-daerah memiliki resiko tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus Covid-19. Kecamatan Indra Makmu yang merupakan Kabupaten Aceh Timur diberlakukan kebijakan PPKM Mikro agar dampak dari penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas yang menyebabkan terpuruknya bidang ekonomi dan dampak lainnya yang bersifat multidimensi.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, PPKM, Covid-19*

ABSTRACT

The implementation of restrictions on community activities, often called Micro PPKM, is carried out in a limited manner in several cities/districts with the aim of reducing the spread of Covid-19 to the village/gampong level and seeking to increase the community's economy slowly and gradually. Micro PPKM is regulated by the issuance of the Minister of Home Affairs Instruction Number 01 of 2021 on January 6 and is enforced from January 11-25 and extended until March 2021. Prior to PPKM Micro, PPKM has been implemented to reduce the spread of Covid-19. Meanwhile, Aceh Province applies restrictions on micro community activities (PPKM) for the period 6-19 April 2021. Micro community activity restrictions (PPKM) are implemented by considering areas that have high risk and become the epicenter of an increase in Covid-19 cases. Indra Makmu Sub-district, which is East Aceh Regency, has implemented a Micro PPKM policy so that the impact of the spread of Covid-19 does not expand which causes the decline in the economic sector and other multidimensional impacts..

Keywords: *Legal Counseling, PPKM, Covid-19.*

1 PENDAHULUAN

Pemerintah menentukan untuk menyelenggarakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) guna menanggulangi penyebaran Covid-19. PPKM sebagai awal di dalam mengukur pekerjaan dilakukan Pemerintah, Pengendalian dan penambahan kasus dalam memberikan perlindungan terhadap dokter maupun tenaga medis yang melakukan perawatan.

Pemberlakuan PPKM Mikro dilakukan secara khusus di Kota/Kabupaten tujuannya agar dapat memangkas penyebaran Covid-19 di tingkat kelurahan/desa kemudian menguasai kenaikan ekonomi masyarakat di Indonesia secara perlahan-lahan.

Berlandaskan pada Ins. Mendagri No. 01 Tahun 2021 maka PPKM atau Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro tertuang tanggal 6 Januari dan berlaku mulai tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 dan diperpanjang sampai Maret 2021 sebelum dilakukannya Pemberlakuan pembatasan kegiatan terhadap masyarakat Mikro, pemerintah sudah melaksanakan PPKM dalam penekanan perluasan virus covid-19. Sementara Provinsi Aceh PPKM berskala mikro dilaksanakan mulai tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021.

Sementara Instruksi Mendagri No. 01/2021 mengenai Pemberlakuan penetapan

Kegiatan dalam mengendalikan Penyebaran covid-2019, di mana dasar pemberlakuan pembatasan antara lain:

- a. Tempat bekerja perkantoran ditetapkan dengan menggunakan 25 persen *work from office* (WFO) dan 75 persen *work from home* (WFH), pemberlakuan aturan/protokol kesehatan sangat ketat;
- b. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara daring atau *online*
- c. Seratus persen tetap berjalan dan berlaku bagi kawasan esensial seperti kebutuhan pokok untuk masyarakat dengan mengikuti kapasitas dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan aturan waktu operasional;
- d. Melaksanakan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. Dua puluh lima persen kegiatan restoran (makan & minum di tempat, layanan makanan yang dipesan dapat diantar, dibawa pulang tetap bisa didapat mengikuti ketentuan mengikuti waktu pengoperasionalan restoran; dan
 2. Waktu 19.00 WIB merupakan batasan waktu operasional di tempat berbelanja seperti mall.

- e. Mengijinkan kegiatan kontruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Zonasi Covid-19 di daerah ditetapkan berdasarkan aturan pemberlakuan PPKM Mikro, terdiri dari zona hijau, kuning oranye, atau zona merah. Daerah yang terken zona merah PPKM dilakukan sampai tingkat RT, dimulai ditutupnya tempat permainan anak, rumah peribadatan, tempat umum bersifat non esensial.

Larangan Masyarakat untuk berkumpul lebihda dari tigaorang. Pergeseran masyarakat keluar dan masuk wilayah RT dibatasi hingga jam 20.00. Dan seluruh kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan harus ditiadakan.

Adapun Skema pemberlakuan PPKM Mikro dapat dilihat pada isi gambar berikut.

Gambar 1.

Zona di Dalam Aturan PPKM Mikro

(Sumber : Kompas, 2021)

Gambar 2.

Zona di dalam Aturan PKKM Mikro

(Sumber : Republika)

Gambar 3.

Pemberlakuan PPKM Mikro pada Zona Merah

(Sumber : Kompas 2021)

PPKM atau sering disebut Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi didalam meningkatnya kasus Covid-19. Daerah ini utamanya di ibukota provinsi dan daerah kabupaten/kota lainnya, di Indonesia termasuk Provinsi Aceh Khususnya di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur Dimana Kebijakan ini membawa dampak semakin terpuruknya baik dalam bidang ekonomi dan dampak lainnya yang bersifat multidimensi. Masih

belum optimalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur dan Masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan melanggar protokol kesehatan di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi menggunakan metode langsung yaitu ceramah dan praktik lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lakukan oleh Tim PKM Mandiri yang dilaksanakan di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur yang dihadiri oleh aparatur gampong. Adapun kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan mendapat sambutan baik oleh keuchik, dan aparatur gampong yang hadir pada hari itu.

Dalam kegiatan sosialisasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan sosialisasi kepada aparatur gampong tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ini berlaku bagi seluruh warga di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur

sehingga warga setempat harus mentaati pemberlakuan yang di adakan pemerintah bertujuan guna masyarakat dapat menghindar dari covid-19 yang semakin parah. Sehingga perlu adanya pembatasan kegiatan di masyarakat sesuai dengan zona masing-masing daerah.

Gambar 4

Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Indra Makmu
Kabupaten Aceh Timur

Sumber ; Dokumentasi, 2021

Gambar 5

Kegiatan Pertemuan dengan Perangkat Kecamatan
Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur

Sumber ; Dokumentasi, 2021

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengurangi Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur pada masa sekarang ini masih temukan warga masyarakat tidak peduli mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada hal PPKM dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga perlu adanya peran serta dari aparat gampong yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur .

Saran yang direkomendasikan adalah antara aparat gampong dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

sehingga penyebaran virus corona bisa segera dapat dicegah dan melindungi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Ulung Napitu, dkk, Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul, *Communnity Development Journal*, Vol.2, No. 2 Juni 2021

1.1 LG, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Bagaimana di Sumut?,
<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-3661-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-bagaimana-di-sumut.html> tanggal 6 Juni 2021

1.2 Subur Dani, *Aceh Berlakukan Pembatasan Kegiatan*

Masyarakat Berskala Mikro Tingkat Desa,

<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/14/aceh-berlakukanpembatasan-kegiatan-masyarakat-berskala-mikrotingkat-desa>.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)